



LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (RAKER)
Dengan	: Menteri Sekretaris Negara
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 2 Februari 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI;2. Rencana strategis Kementerian Sekretariat Negara RI dalam susunan "Kabinet Kerja"2014-2019;3. Pembicaraan awal Pembahasan APBN-P 2015;4. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014;5. Dan lain-lain
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Anggota Komisi II DPR RI: 43 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
7. ARIF WIBOWO
8. BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
9. DIAH PITALOKA, S.sos
10. Ir. TAGORE ABUBAKAR
11. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
12. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM
13. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH
14. Drs. SIRMADJI, M.Pd

F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

15. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
16. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
17. TABRANI MAAMUN
18. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

PERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

WIKIN SOLTHAN, M.Si

WANG RIYANTO, SH, MH, M.Si

21. H. SUBARNA, SE., M.Si
22. SUASANA DACHI, SH
23. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

24. H. ZULKIFLI ANWAR
25. Ir. FANDI UTOMO
26. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

27. YANDRI SUSANTO
28. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.
29. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn
30. AMRAN, S.E.

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

31. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si
32. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

33. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.
34. Dr. H SA'DUDDIN, MM
35. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

36. H. MOH. ARWANI THOMAFI
37. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
38. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

39. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH
40. Drs. TAMANURI, MM
41. H. M. LUTHFI A. MUTTY

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

42. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
43. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

B. Pemerintah:

- Menteri Sekretaris Negara RI (Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Yang terhormat Saudara Menteri Sekretariat Negara beserta jajarannya;

nisi II dan para anggota komisi II yang berbahagia.

Ujarkan puji syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, pada hari kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretariat Negara dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dibidang Pengawasan dan Anggaran dalam keadaan sehat wal'afiat. Di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu merupakan hal kewajiban, jika dibidang anggaran juga adalah seperti itu karena memang tugas komisi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran adalah pertama mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Yang kedua mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, bersama-sama dengan pemerintah.

Yang ketiga membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian lembaga yang menjadi Mitra kerja komisi. Dalam hal ini adalah komisi II.

Yang keempat mengadakan pembahasan laporan keuangan Negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya, setelah pembicaraan dilakukan menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam poin yang kami jelaskan tadi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud yang kami jelaskan tadi maka kita akan ajukan ke badan anggaran untuk sinkronisasi.

Oleh karena itu, pertemuan ini 2 hal mungkin pengawasannya nanti tidak akan seberapa kita perbincangkan, tapi kalau fungsi anggaran karena ini adalah hak konstitusional bahwa komisi II dalam rancangan pendahuluan ini akan disampaikan oleh Pemerintah atau Komisi II nanti akan kita dalam bersama pada tanggal 6 dan 7 bulan ini juga. Hasil pembicaran itu akan kita sampaikan kepada badan anggaran untuk di harmonisasi, oleh karenanya dan rapat ini sangat penting, sesuai laporan sekretariat daftar hadir telah ditanda tangani oleh 30 orang anggota dari 50 dan dihadiri oleh full 10 fraksi, jadi tidak ada yang tidak hadir.

Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) peraturan tata tertib maka perkenankan kami membukanya rapat ini dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri dan jajarannya dan rapat ini adalah rapat yang pertama, jadi kita tidak bertegang-tegang, ini rapat yang pertama kalau ada yang ingin mempernyatakan nanti tidak usah lagi ditanyakan tentang apakah Nomor Perpu yang sudah kita tetapkan Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Pilkada dan Pemda sudah ke luar belum, langsung Pak Menteri sudah nyatakan tadi sudah keluar nomornya Nomor 1 ada di dompet saya ini, ya Nomor 1 dan Nomor 2 lembaran negaranya juga sekalian sudah dikeluarkan hari ini. Tinggal tadi yang kita bicarakan Ampresnya kapan turun, nanti kalau itu dijelaskan Pak Menteri kalau Ampresnya ya secepatnya diturunkan, satu hari diajukan, satu hari itu juga akan dikeluarkan Ampresnya, ini sudah keputusan pertama.

Jadi ya namun demikian karena ini adalah resmi karena ini pertama Saudara Menteri dari pimpinan saya sendiri Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar orang baru tapi pendaatng lama, di sebelah kiri saya pimpinan di Komisi II adalah Pak Wahidin Halim dari fraksi Partai Demokrat, di sebelah kiri adalah Pak Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sebelah kanan kami pimpinan adalah Pak A. Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, dan sebelah kanan lagi adalah saudara yang terhormat Mustafa Kamal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini yang dari pimpinan, nanti dari anggota juga kita akan perkenalkan masing-masing, dan sebelum masuk materi nanti juga Saudara Menteri memperkenalkan jajarannya, sebab sebelumnya juga kita buat suasananya sam-san sen lah,

nya cukup baik seperti tadi saya kira luar biasa dan kami
n secara singkat sampai ke kiri setelah selesai nanti itu nanti,
berapa hal, nanti kita buka dialog mudah-mudahan jam 12
sebelum lohor, sebelum lohor sudah dapat kita akhiri jadi acara kita 2 ini setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Kami persilakan dari sayap kanan.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat pagi saya nama Syarif Abdullah Nomor anggota 29 dari Dapil Kalimantan Barat dari fraksi Partai Nasdem terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Pak Menteri yang saya hormati, nama Yandri Susanto Nomor anggota A-494 Dapil Banten II Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dari Fraksi Partai Amanat Nasional. terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH):

Bambang Riyanto A-357 dari Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Tengah V Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali.

F-PG (Drs. H. DADANG S. MUCHTAR):

Baik, terima kasih Pimpinan, nama saya Dadang S. Muchtar Nomor anggota 263 dari Fraksi Golkar dapil 7 Jawa Barat, Karawang, Purwakarta, Bekasi.

F-PG (Drs. H.A. MUJIB RAHMAT):

Nama Mujib Rahmat dari Fraksi Golkar daerah pemilihan Dapil 1 Jawa Tengah Semarang, Kendal, Ungaran dan Salatiga.
Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Saya Azikin Solthan daerah pemilihan dapil I Sulawesi Selatan dari faksi Partai Gerindra.
Terima kasih.

amafi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jawa Tengah III, Kabupaten Rembang, Pati, Grobogan dan Blora.

KETUA RAPAT:

Terus lapisan belakang

F-HANURA (Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, Sos., MH):

Nama saya Frans Agung Mula Putra Dari Fraksi Hanura Nomor anggota 549 Dapil Lampung I. Terima kasih.

F-PKB (Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM):

Terima kasih nama saya H. Zainul Arifin Noor dari Fraksi PKB dan daerah pemilihan Kalimantan Selatan I, Terima kasih.

F-PG (TABRANI MAAMUN):

Terima kasih Pimpinan, nama saya Tabrani dari daerah pemilihan Riau I Nomor anggota A-241 dari Partai Golongan Karya. Terima kasih.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si):

Terima kasih Dapil Jateng 9, Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal diwakili Agung Widyantoro A-279 dari Fraksi Beringin Sakti atau Partai Golkar.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.sos):

Saya Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Barat III, kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, terima kasih.

F-PAN (AMRAN, S.E):

Terima kasih pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, nama saya Amran Nomor anggota 503 dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sulawesi Selatan III yang meliputi 9 Kabupaten, Kabupatennya tidak usah disebutkan karena panjang sekali Pak menteri, sekian.

Bilahaufik Walhidayah Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

F-PPP (KH. ASEP AHMAD MAOSUL AFFANDY):

Saya Asep Ahmad Maosul Affandi anggota Nomor 520 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jawa Barat 10 meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Terima kasih.

MUTTY, M.Si):

Menteri dan jajaran yang saya hormati, nama saya Lutfhi Mutty Nomor anggota A-34 dari dapil Sulawesi Selatan III fraksi Partai Nasdem, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sayap kiri

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

Baik.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Nama saya Rufinus Hutahuruk Dapil 2 Sumatera Utara Nomor anggota 546 dari fraksi Partai Hanura, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd., MM):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, nama saya H. Sukiman Nomor anggota A-498 daerah pemilihan Kalimantan Barat dari fraksi Pakaian Amanat Nasional. Kalimantan Barat kebetulan 14 Kabupaten, 5 kabupaten perbatasan langsung dengan Malaysia, mungkin itu ya ingin saya sampaikan, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

F-PD (LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH):

Terima kasih Pimpinan nama saya Libert Kristo Ibo Dapil Papua, Partai Demokrat.

F-GERINDRA (SUASANA DACHI, SH):

Selanjutnya saya Suasana Dachi Nomor anggota 328 fraksi Gerindra, Dapil Sumut II. terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu dari Nias Saudara Menteri, Nias.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH):

Nama saya Komarudin Watubun Nomor Anggota A-320, Dapil Papua fraksi PDI Perjuangan.

F-NASDEM (Drs. TAMANURI, MM):

Terima kasih Pak Pimpinan,

beserta jajaran, nama saya Tamanuri Nomor 9 dari Dapil II

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih Pimpinan, Pak Menteri beserta jajaran, nama saya H. Zulkifli Anwar Nomor anggota 409 Fraksi Demokrat daerah pemilihan Lampung I.

Mohon ijin pak Pimpinan, khusus kepada Bapak Brigjen TNI Marinir Bambang, saya ucapkan Jaleshokumyarka Jaya Mahe dan pimpinan supaya tidak tegang tadi pimpinan mengatakan ada Samsamsen sama-sama enak ditambah yang bagus pimpinan Samsamsun, sama-sama untung, terima kasih pimpinan.

F-PDIP (Drs. SIRMADJI, M.Pd):

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati, mama Sirmadji A-199 PDI Perjuangan Jawa Timur VII, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek dan Pacitan, terima kasih.

F-PDIP (TAGORE ABU BAKAR):

Terima kasih Pimpinan,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Bapak Menteri yang kami hormati Nama kami Tagore Abubakar dari Dapil II Aceh, mulai dari Takengon sampai ke Tamiang dari Fraksi PDI Perjuangan.
Merdeka!

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):

Terima kasih Pak Ketua, Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati, saya Endro Harmono A-369 dari Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur 6 Meliputi Blitar, Tulungagung, Kediri, Salam Indonesia Raya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada yang baru datang? tidak ya? baik, Saudara Menteri memang tamu harus diutamakan, itu hadis nabi itu. Oleh karenanya Saudara Menteri memperkenalkan jajarannya sekaligus, menyampaikan paparan dalam 2 hal tadi. Baru kita masuk nanti dialog, Pertanyaan dan lain sebagainya, yang pasti akan kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya apalagi yang menyangkut anggaran akan kita bicarakan secara khusus kami persilakan dengan Hormat Saudara Menteri.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI (Prof. Dr. PRATIKNO, M.Soc.Sc):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Om Swastiastu

Bapak Pimpinan komisi II beserta anggota komisi II yang saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga ini untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan rencana strategis secara umum dan kemudian juga mengenai anggaran, tapi sebelum itu sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak pimpinan kami juga ingin memperkenalkan jajaran kami secara cepat.

Saya menayangkan dalam bentuk foto semua foto ada semua pakai jas semua kecuali Menteri he he, jadi itu mulai dari atas itu mulai dari urutan jelek kira-kira ya, yang bawah yang paling ganteng jadi kita memiliki ada 5 staf ahli dan ada 2 staf khusus yang sebagian hadir bersama kita di sini, kemudian ada Sekretaris Menteri yang berada di kanan saya, saya kira sudah bapak ibu kenal karena sebelumnya juga di Hublem di hubungan kelembagaan Pak Taufik kemudian, ada inspektorat di inspektorat itu hadir juga bersama kita ada di belakang.

Kemudian kita mempunyai beberapa Deputy yaitu Deputy bidang Perundang-Undangan ini yang paling banyak sekali berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu di komisi ini yaitu Pak Sapta, dari belakang ini tadi yang ngejar-ngejar dalam 2 Nomor Undang-Undang dan Perpu.

Kemudian ada Deputy Hubungan Kelembagaan yang banyak berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu di DPR juga karena tugas dan fungsinya adalah mengelola hubungan kelembagaan termasuk antara Presiden dengan masyarakat bukan hanya dengan DPR Pak Giri, hadir juga bersama kita di belakang, kemudian Deputy bidang Sumberdaya Manusia ini juga untuk mengurus internal, kebanyakan ini SK SK mengenai, Kepres Kepres mengenai pengangkatan pejabat dan lain-lain hadir juga bersama kita Pak Cecep.

Kemudian Deputy Bidang Dukungan Kebijakan yang melakukan analisis terhadap apa misalnya permintaan surat, masukan dan lain lain, sebelum sampai kepada disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara atau kepada Presiden juga hadir bersama kita Pak Chairil.

Dan kemudian Sekretaris Militer yang membawahi pasukan dan Pamres Pak Tri ini juga hadir bersama kita, Sekretariat Wakil Presiden, yang wakil presiden Pak Umar tidak bisa hadir ini yang mengurus dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada bapak Wakil Presiden.

Kemudian juga Sekretariat Presiden Plt Pak Djarot bersama kita juga selain juga nanti itu ada beberapa unit dibawahnya termasuk yang mengelola istana.

Nah di luar hal tersebut ada pusdiklat di belakang Pak Kapusdiklat selain itu juga ada Pengelola Kawasan bapak, jadi Sekretariat Negara itu mengelola beberapa side beberapa lahan, beberapa space yaitu terutama sekali Gelora Bung Karno di sini dan Kompleks Kemayoran itu dikelola oleh beberapa badan layanan umum, ini kepala BLU juga hadir Kemayoran, silakameliputi di Kemayoran dan Gelora Bung Karno, hadir juga bersama kita.

Nah selain yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Sekretaris Negara ini sebetulnya penganggaran Kementerian Sekretariat Negara juga ada yang Satker lain yang tidak secara organisatoris tidak berada langsung di bawah Menteri Sekretaris Negara, cuma penganggarnya dalam tanda petik" masih menunggu di Sekretariat Negara, yaitu LP SK ini Bapak Kepala LPSK dan ada satu lagi Sekretariat Wantimpres, belum betul lupa saya Sekretariat Wantimpres Pak Biantoro ini sudah mulai bekerja, karena Wantimpres sudah.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Maaf Interupsi Pimpinan

KETUA RAPAT:

Jangan potong dululah

lanjutkan ini kan dalam rangka mitra kerja struktur ini sudah
ditayangkan ya enggak ada di kita apa lah salahnya demi keharmonisan kita dibagi, takut lupa
pimpinan

KETUA RAPAT :

Tidak, ndak bakal lupa kita, nanti akan di bagi, biar selesai dulu Saudara Menteri menjelaskan
semua.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI:

Hadir juga bersama kita Wakil dan Paspampres, ya terima kasih.
Bapak pimpinan dan bapak Ibu anggota.

Saya akan memulai dengan renstra Sekretariat Negara sepintas, sebetulnya detailnya itu untuk
penganggarannya ada di dalam dokumen yang sudah kami serahkan kepada komisi II dan juga ini
pointersnya ini kami serahkan juga sudah digandakan juga di sini di Sekretariat.

Jadi prinsipnya bapak/ibu sekalian, Kementerian Sekretariat Negara itu membantu presiden
menjalankan peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem
Presidensiil kita, nah barangkali juga akan menjadi pertanyaan bagi bapak ibu sekalian yang
menopang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu selain Sekretariat Kabinet
juga ada Sekretariat maaf selain Sekretariat Negara juga ada Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh
Sekretaris Kabinet.

Selain itu, di dalam Perpres kelembagaan yang baru, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas, Kepala Bappenas itu juga langsung berada di bawah
presiden, kemudian BPKP itu juga langsung berada di bawah presiden karena ini bukan kementerian
sektoral, jadi presiden menginginkan bahwa perencanaan pembangunan itu tidak lagi berada di bawah
Menko Ekuin seperti dulu, karena perencanaan ini merupakan policy makro yang tidak hanya terkait
dengan bidang ekonomi, BPKP pengawasan juga demikian presiden berkepentingan untuk menjamin
agar pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan efektif dan presiden memperoleh informasi yang
memadai dalam melaksanakan pembangunan.

Nah selain itu ada satu unit di bawah presiden yang baru yaitu Unit Staf Kepresidenan yang
juga baru saja dibentuk tetapi UKP 4 yang dulu ada itu ditiadakan, dan sekarang ditangani oleh Unit
Staf Kepresidenan, saya kira itu pengantar selain saya hanya ingin mengantarkan selain Sekretariat
Kabinet maaf Sekretariat Negara juga ada komponen-komponen lain hubungan-hubungan yang
membantu presiden, sedangkan Kementerian Sekreatrait Negara mempunyai tugas dan fungsi untuk
memberikan dukungan teknis administratif, dan analisis kepada Presiden Dan Wakil Presiden dalam
menjalankan fungsi apa perannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Satu hal yang
kemudian harus diperankan oleh Sekretariat Kabinet adalah menjadi simpul arus lalu lintas informasi
dari berbagai macam seluruh kementerian sebelum masuk kepada presiden, selain Sekretariat Negara
sebetulnya Sekretarist Kabinet juga menjalankan fungsi yang sama, dalam hal kebijakan-kebijakan di
level kabinet.

Nah atas fungsi tersebut kami menjaga betul agar menghindari kesalahan tetap aman,
akuntable kemudian di satu sisi menjaga kerahasiaan negara, tapi di sisi lain juga memberikan
informasi yang memadai kepada publik, juga efektif dan efisien. Jadi kami berusaha keras untuk secara
sistematis meningkatkan efisiensi di Kementerian Sekretariat Negara ini termasuk bagaimana
meningkatkan efisiensi di dalam kerja-kerja Presiden dan Wakil Presiden, nanti kami akan sampaikan
lebih detail.

Yang kami prioritaskan dalam mendukung tugas Presiden Dan kita meningkatkan kualitas, aktifitas, dan efisiensi untuk aktif kepada presiden, dukungan substantif maupun pelayanan kepada masyarakat karena termasuk pengaduan-pengaduan itu juga banyak diajukan, ditangani oleh Deputi Hubungan Kelembagaan ini juga bisa terus untuk kita tingkatkan dan secara terus menerus, kita juga berusaha untuk meningkatkan konsistensi regulasi secara horisontal maupun vertikal.

Sekarang ini sedang kita rancang berbagai upaya agar proses perumusan perundang-undangan bisa berjalan lebih cepat dan pada saat yang sama juga terjaga konsistensinya secara vertikal dan secara horisontal, tentu saja ini kita kerjakan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Nah yang lain yang ini juga tugas yang berat adalah memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara karena cukup banyak aset negara yang dikelola, diserahkan pengelolaannya kepada Kepada Sekretariat Negara, walaupun tidak dikelola secara langsung karena sudah dibentuk Badan Layanan Umum misalnya Badan Layanan Umum PPKK untuk Kemayoran dan Badan Layanan Umum Gelora Bung Karno yang punya wewenang untuk melakukan, apa namanya kebijakan-kebijakan untuk kerja sama dan lain-lain dalam pengelolaan aset negara tersebut.

Nah berikutnya lagi kita juga berusaha untuk memperbaiki Birokrasi kita baik itu dalam rangka meningkatkan efisiensi, ketatalaksanaan, dan lain-lain, program kerja untuk 2015-2019 juga terus dalam proses finalisasi, selain peningkatan SDM, penataan program aset keuangan, dan teknologi informasi, ini juga poin yang terakhir ini kita garap secara serius, di satu sisi kita ingin membuat sistim administrasi berbasis IT yang handal, tetapi juga sekaligus aman karena ini banyak terkait dengan rahasia negara.

Strategi implementasinya berikutnya ya kita berusaha untuk menemukan terobosan secara terus menerus, mereview cara kita bekerja agar tidak seringkali ada proses-proses kegiatan administrasi yang sudah tidak relevan yang ini dalam proses ini akan kita sederhanakan dengan menggunakan IT seperti tadi saya katakan juga melakukan sinergi antar kelembagaan.

Nah terkait dengan perencanaan APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kami ingin melaporkan beberapa hal naskah detilnya sudah ada di dalam teks yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk pertama untuk realisasi APBN tahun 2014 Pendapatan Negara Bukan Pajak kita tahun 2014 adalah Rp.258 milyar itu targetnya dan realisasinya telah Rp.362 milyar lebih, artinya PNBPN kita mengalami capaian lebih dari yang direncanakan untuk tahun 2014 di atas 40 persen lebih dari target yang dicanangkan.

Sedangkan untuk alokasi anggaran belanjaan kita tidak menyerap sepenuhnya Rencana APBN 2014 jadi dari rencana sebesar 2,3 T lebih, kemudian menjadi 2,0 sedikit T dengan kata lain serapan anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar 85,23 persen. Total anggaran tersebut di kelola oleh cukup banyak Satker baik itu Satker satuan kerja dalam unit organisasi Sekretariat Negara, baik itu Setneg sendiri KHN, BLU, PPK Gelora Bung Karno, BLU PPK Kemayoran, kemudian ada unit organisasi Satker-satker di Unit organisasi kepresidenan, Sekretariat Presiden, mohon maaf. Itu mulai istana di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta dan juga Satker di Tampaksiring Bali.

Kemudian Satker di bawah Sekretariat Wakil Presiden, Satker di Sekretariat Militer Presiden, Satker di Paspampres di Setmil Pres ini menjadi ...(suara tidak jelas) terus kemudian di unit organisasi Wantimpres ini ada 1 Satker yang terpisah juga untuk wantimpres dan kemudian ada Unit Organisasi UKPP Satker UKP 4 ini yang tadi ini sudah masuk di dalam perencanaan tahun 2015, tetapi lembaga ini ditiadakan dan kemudian dikonversi untuk menjadi Satker masuk kepada Unit Staf Kepresidenan.

Selain itu ada masih bersama Sekretariat Negara sebetulnya ini merupakan organisasi yang ...(suara tidak jelas) yaitu Unit Satker LPSK ditumpangkan ke Sekretariat Negara. Sedangkan alokasi anggarannya bapak ibu yang untuk 2015 ini dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis itu ada 1,29 trilyun, sementara peningkatan sarana prasarana aparatur itu 479 milyar, kemudian penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan pada Presiden dan Wakil Presiden itu sebesar 275

elola oleh Kementerian Sekretariat Negara ada belasan satker
Rp. 2,0 sekian trilyun.

terkait dengan alokasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara
tahun 2015 ini ada beberapa penyesuaian anggaran KHN telah dibubarkan jadi Komisi Hukum Negara
itu telah dibubarkan berdasarkan Perpres Nomor 176 tahun 2014 sekarang masih menunggu
keputusan dari Kementerian Keuangan dan rencananya akan dialihkan kepada Kementerian Hukum dan
HAM dari apa namanya alokasi anggaran untuk Komisi Hukum Nasional tersebut, ini karena Presiden
sedang melakukan upaya untuk penyederhanaan organisasi-organisasi lembaga non struktural itu,
biasanya dalam bentuk komisi-komisi itu akan disederhanakan dan terkait dengan anggaran di
Kemensesneg ini ada satu di bubarkan yaitu KHN.

Kemudian anggaran ada juga hasil optimalisasi pada BLU PPK Gelora Bung Karno sebesar
sekitar 15 M yang akan digunakan untuk renovasi Vnew sebagai persiapan Asian game nanti tahun
2018. Jadi kita akan menjadi host dan pusatnya akan di Jakarta dan kemudian ada di Palembang, dan
nah ini masih ada sedikit masalah berdasarkan review BPKP itu masih belum dapat dicairkan.

Saya kira itu gambaran umum dari 2 hal tadi yang kami sampaikan selain perkenalan
kemudian gambaran singkat mengenai rencana strategik dan anggaran untuk tahun, laporan untuk
tahun anggaran 2014 dan kemudian perencanaan untuk tahun 2015, hal-hal lain nanti akan
disampaikan oleh tim kami secara lebih detail.

Saya kira itu Bapak Pimpinan kurang lebihnya kami mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

KETUA RAPAT:

Apa masih ada tambahan Saudara Menteri.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI:

Saya kira cukup.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Saudara Menteri menjelaskan 2 hal tadi, kami sekarang kita buka pembicaraan
Saudara Budiman, yang terakhir datang ini Pak Budiman Sudjatmiko ya?

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil):

Yang Pertama tanya ya?

KETUA RAPAT:

Tapi ya jangan yang pertama dulu, kita tawarin dulu Pak Menteri itu Budiman Sudjatmiko dari
PDIP, Kyai Sa'aduddin dari PKS, bukan, ini saya perkenalkan, karena belum diperkenalkan tadi, belum
bicara, belum. Per Fraksi saja dan kita persingkat, saya kira dan saudara Yandri sudah tidak ada lagi
yang belum saya sebut Saudara William dari Kalimantan Tengah, terus Pak Fandi atau langsung saja
Pak Fandi ngomonglah.

kan diri Pak. Ya karena terlambat, mohon maaf Pak Ketua Nama Saya Willi M. Yoseph A-220 fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Terima kasih.

F-PD (Ir. FANDI UTOMO):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Kami Fandi Utomo dari daerah pemilihan Jawa Timur I, Surabaya, Sidoarjo dari fraksi partai Demokrat.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah semua, sudah saya perkenalkan tadi, sebelah kiri ada yang belum? ya Adian Napitupulu, saya langsung saja memperkenalkan ya? itu dari Fraksi PDIP.

Saya kira sudah cukup kita buka sekarang dialog menggunakan hak konstitusional kita dua bidang ini saja gak usah dulu yang berat-berat, tidak usah, masih banyak waktu begitu ya? ya satu fraksi satu orang saja dan kita persingkat, jangan lebih dari 5 menit lah, jangan lebih, jangan lebih, sudah satu orang saja.

Kami persilakan, tapi konsensus ya, saya kira kalau mau Budiman duluan bicara, apa begitu ya? satu orang saja dan jangan lebih, kami persilakan.

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Terima kasih Bapak Menteri dan seluruh jajaran dan pimpinan serta rekan-rekan komisi II.

Tadi disebutkan salah satu tugas dari Kementerian Sekretariat Negara Sinkronisasi penguatan secara vertikal horisontal dalam pelaksanaan Undang-undang, di kita sekarang ini banyak sekali Undang-undang saling tumpang tindih Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Sumber Daya Alam, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Keistimewaan, dan segala macam.

Saya barusan dari Jogja mendapatkan kasus menemui kasus ketika antara Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Keistimewaan mengalami tumpang tindih, dalam soal sultan ground nah gak, saya ini gak masuk kepada kasusnya, tapi bagaimana Kementerian Sekretaris Negara menentukan sikap dan memberikan nasihat kepada presiden juga arahan kepada gubernur-gubernur, terutama provinsi-provinsi yang memiliki Undang-Undang keistimewaan atau kekhususan, ketika satu Undang-Undang yang bersifat umum ketika diterapkan pada daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan ternyata secara diametral filosofinya bertentangan.

Misal contoh antara tanah kas Desa yang betul-betul itu adalah milik desa tapi dalam kasus keistimewaan atau sultan ground dia menjadi tidak punya kuasa Desa dan itu sekarang namanya sudah menjadi isu, minggu lalu saya bertemu dengan Pak Sultan dan bertemu dengan Kepala Desa, menjadi isu yang dalam waktu dekat bisa saja akan menjadi permasalahan, jadi saya pikir karena pak Sesnegnya juga kebetulan dari Jogja, yang pasti familiar betul dalam soal-soal seperti ini, tapi saya tidak masuk kasusnya. Saya ingin bertanya bagaimana Sekneg memberikan masukan pada presiden

ang secara diametral filosofinya bertentangan, saya kira itu

KETUA RAPAT:

Lanjut dari Partai Golkar Saudara Mujib.

F-PG (Drs. H.A. MUJIB RAHMAT):

Terima kasih,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Pak Menteri Selamat dan bapak-bapak sekalian yang lainnya, pimpinan dan anggota komisi II yang saya hormati.

Pertama terkait dengan soal organisasi di lingkungan Presiden atau organisasi-organisasi, badan-badan yang tadi saya sepakat dengan Pak Menteri tadi untuk melakukan evaluasi terhadap sebegini banyaknya badan, lembaga, komisi-komisi yang barangkali ini kelihatannya ada overlap overlap juga di kaitkan dengan prinsip efisiensi, dikaitkan juga dengan ini Pak Menteri, dikaitkan dengan semangat kita untuk Desentralisasi, semangat kita untuk Otonomi dan sebagainya, harusnya lembaga-lembaga, badan-badan yang di pusat itu harusnya semakin kecil, tapi kemudian kita melihat dari bertahun-tahun itu ternyata masih cukup besar juga, saya kira mungkin perlu ada limitasi waktu oleh Pak Menteri kapan kira-kira hasil devaluasi terhadap masing-masing badan, kemudian bisa lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya juga muncul jangan sampai nanti setiap saat muncul yang baru lagi, misalnya ini kasus ada Wantimpres kemudian lalu muncul tim 9 meskipun sampai sekarang juga kita belum tahu apakah di-kepres-kan atau tidak. Nah ini jangan sampai suatu saat, kasus tertentu ada lembaga lagi, kasus tertentu ada lembaga lagi, dan ini menjadi trend di masa-masa yang dulu kalau ada masalah dibuatkan lembaganya saya kira, saya setuju dengan Pak Menteri tadi ingin melakukan evaluasi cuma barangkali kami minta informasi kira-kira kapan hal-hal tersebut bisa dilakukan.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan APBN saya melihat PNBPNya pada tahun 2014 bagus sekali Pak Menteri, yaitu ada lebih besar dari targetnya di 258 menjadi 362, tapi kemudian pada tahun 2015 apakah ini memang sengaja dibikin agak apa namanya Tawadhu Pak Menteri, jadi agak pelan-pelan saja tapi nanti hasilnya sama *gitu*, karena ini turun dari 362 yang dihasilkan pada PNBPN 2014 menjadi 288, ini apakah gaya Pak Menteri kaya gaya Jogja, alon-alon nanti kemudian hasilnya bagus, moga-moga itu Pak Menteri.

Kemudian juga terkait dengan APBNP ini juga tak permohonan Pak Menteri 209 dengan sekian programnya tapi kemudian oleh Menteri Keuangan disetujui hanya 29 ya Pak Menteri ya? 29 itu pun peruntukannya bukan peruntukkan yang direncanakan oleh Pak Menteri, nah saya pikir apakah ini waktu itu perencanaannya kurang komunikasi atau apa sehingga dengan demikian, lalu yang muncul adalah persejuannya hanya 29 dan itu bukan untuk rencana kerja Pak Menteri. Karena itu barangkali pada saat nanti kita membicarakan detail mengenai usulan Pak Menteri tadi apakah Pak Menteri juga akan tetap mengajukan ini di 209 untuk APBN-P mumpung kita masih di tingkat apa namanya belum selesai pembicaraan mengenai APBNP ini.

Kemudian juga di kaitan dengan PNBPN tadi Pak Menteri bagaimana kelihatannya tadi yang direncanakan itu pun tadi lebih banyak hanya dari 2 sektor saja, yaitu GBK dengan Kemayoran lalu bagaimana dengan istana-istana kita Pak Menteri, apakah tidak ada rencana yang bagaimana kira-kira istana-istana kita itu ikut memberikan pencerdasan kepada masyarakat dengan inovasi-inovasi tertentu sehingga orang-orang yang datang ke sana ke istana-istana kita itu lebih banyak dan tentu akan melahirkan juga tambahan dari PNBPN kita. Saya belum melihat rencana kerja itu padahal menurut saya

ini saya kira juga menarik Pak Menteri, apakah yang ada di apakah yang ada di Tampak Siring dan lain sebagainya, kok -istana kita itu, barangkali itu menjadi catatan penting yang ingin saya sampaikan.

Yang terakhir saya sama dengan mas Budiman tadi ketika di Jogja ketemu itu, ketika di tempat lain juga ketemu yang lainnya, yaitu tentang program konstitusi regulasi horisontal dan vertikal, ini tidak hanya di Undang undang nya Pak Menteri apalagi di PP nya, teman-teman daerah itu yang terkait dengan keuangan ini luar biasa Pak begitu salah sedikit nanti salah administratif yang turun adalah Kejaksaan Pak, yang turun adalah KPK, ini mengkhawatirkan sekali posisi mereka kasihan sekali, kalau sampai misalnya PP nya itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Karena itu usulan kami Pak yang disebut dengan regulasi itu tidak hanya Undang undang nya tetapi juga masuk ke dalam PP nya, saya kira itu, terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan dari Partai Gerindra. Siapa?
Gerindra ada?

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):

Ya, terima kasih Ketua.

Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Juga kita dari Partai Gerindra menyoroti adanya beberapa overlapping di dalam Kementerian ini dan juga mengharapkan bahwa dengan adanya overlapping ini bisa dibenahi yang lebih lanjut agar supaya nantinya lebih efisien.

Yang kedua yang ingin juga kami titik beratkan adalah bahwa dengan adanya pencapaian yang 85 persen ini salah satu yang menjadi, yang disampaikan adalah adanya pengurangan-pengurangan yang dilaksanakan atas kebijakan pemerintah salah satunya perjalanan dinas kemudian, rapat-rapat di hotel dan sebagainya yang kita tahu bahwa dengan adanya rapat di hotel ini, maraknya adalah di 2 bulan terakhir ini, ketika kebijakan Menteri mengeluarkan itu, sehingga kita juga nanti mengharapkan dengan adanya 2 bulan saja sudah menghasilkan suatu signifikan untuk anggaran ini, mudah-mudahan yang kedepan akan lebih baik lagi karena apa? karena kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan pembelanjaan ini kita antara pembelanjaan modal dan pembelanjaan kerja ini sekarang masih membutuhkan untuk kegiatan lebih lanjut.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, lanjut PAN ya? Pak Yandri? oh Demokrat.

F-PD (Ir. FANDI UTOMO):

Terima kasih.

**Pimpinan dan anggota yang terhormat,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

di pikiran sebetulnya yang sudah dimulai dari UKP 4 pak, policy itu ada di dilingkungan Setneg. Saya kira kalau Bappenas aspek-aspek pembangunan dan itu cenderung tehnikley tetapi yang bersifat policy kepala negara, yang bersifat policy president, ini saya kira dibutuhkan satu proses sinkronisasi yang sebenarnya tidak mudah terutama pada tingkatan bagaimana tujuan-tujuan negara dan tujuan-tujuan visi presiden itu bisa dicapai.

Oleh karena itu keberadaan UKP 4 itu yang sekarang berubah menjadi Kepala Staf mestinya, semestinya itu di pikirkan dikembangkan menjadi semacam *president office policy* begitu, dan saya tidak tahu apakah Setneg punya ruang yang cukup untuk membuka diri terhadap kemungkinan sinkronisasi ini mengingat peran sekretaris apa Setneg yang sebetulnya bisa melakukan kordinasi tidak sebatas pada tingkatan pembangunan, tetapi juga pada tindakan politik dan tingkatan yang lain saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ini UKP4, tadi dari Pak Fandi dari Demokrat untuk dilanjutkanlah semangatnya kira-kira begitu walaupun apa konsepnya sudah. PAN Pak Yandri kami persilakan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota komisi II; Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Yang pertama Pak Menteri menyangkut tentang aset negara ini pak, terutama Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang periode lalu juga kita banyak persoalkan di komisi II ini Pak. Karena kalau kita lihat ini kan daerah pusat bisnis yang sangat menggiurkan, tetapi pada faktanya lebih kepada membebani Negara sebenarnya pak, karena kalau kita lihat pemasukannya sangat kecil, misalkan tadi kalau Pak Menteri cantumkan pertahun saja Rp.24 milyar, saya kira ini tidak masuk akal sebenarnya pak.

Nah oleh karena itu mungkin pimpinan kita perlu juga mengagendakan, membedah betul dimana sebenarnya manajemen pengelolaan Kemayoran dan Gelora Bung Karno termasuk aset-aset yang di Senayang Pak, seperi Senayan City, Plaza Senayan dan lain sebagainya itu, apakah ada yang kalingkong di situ. Ini menurut saya mesti dibuka Pak Menteri, ini saatnya Pak Menteri dari awal karena kita cium ini Pak Menteri ada semacam bajakan bagi pejabat-pejabat dan pihak lain terhadap aset-aset ini, saya kira ini penting karena tidak masuk akal menurut saya tadi, aset yang begitu besar itu menghasilkan hanya 24 milyar dan 21 milyar ini tidak masuk akal Pak Menteri. Nah oleh karena itu mungkin di awal kinerja Pak Menteri ini betul-betul digenjot ataupun di reformasi Pak, tata cara pengelolaannya ini penting Pak Menteri.

Kemudian yang kedua menyangkut aset tadi sebenarnya aset kita itu berapa Pak yang di bawah Sekretariat Negara Pak? sehingga dari situ kan kita akan menghitung sebenarnya menguntungkan atau yang saya katakan tadi, lebih membebani atau bagaimana Pak? mungkin kita juga bisa cari solusinya kalau misalkan kita diajak rembug untuk memaksimalkan pemasukan negara bukan pajak dari aset negara tadi Pak, itu yang pertama Pak Menteri.

Kemudian yang kedua, tadi Pak Menteri juga sudah saya sampaikan dan kita juga sudah mendengar bahwa ada beberapa komisi yang dibubarkan yang mungkin itu memang tidak efektif dan efisien, tapi pada kesempatan ini mohon Pak Menteri sampaikan dari sisi mana lagi sehingga itu

nyak komisi itu lahir karena perintah undang-undang Pak. Nah apa namanya dilihat dari sisi perintah undang-undang atau barkan karena itu perintah undang-undang saya kira ini agak rawan Pak, karena kalau itu perintah undang-undang berarti dia memang harus lahir. Tinggal kalau memang tidak efektif tidak efisien ya di situ fungsi kita Pak, bukan membubarkannya. Ibarat apa namanya ada tikus di lumbung padi, bukan lumbung padinya yang dibakar Pak, tapi tikusnya yang kita bunuh ya kan. Jadi jangan sampai kita menganggap tidak efisien tidak efektif kemudian semuanya kita bubarkan, sementara itu adalah perintah undang-undang Pak.

Jadi mohon Pak Menteri, saya pada prinsipnya setuju Pak kalau memang itu tidak efisien tidak efektif, itu kita evaluasi, tapi bukan pada tahap langsung kita apa namanya membubarkan lembaga tersebut, dan saya kira perlu juga dikonsultasikan dengan Komisi II Pak Menteri ya kan, karena membuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR Pak. Jangan sampai pemerintah menterjemahkan sendiri ini tidak butuh, ini tidak butuh, sementara waktu membuat pemerintah tidak bisa berdiri sendiri Pak tanpa persetujuan dari DPR.

Kemudian menyangkut komisi tadi Pak, kalau tadi Komisi Hukum Nasional kan sudah dibubarkan, betul Pak Menteri? sementara kalau kita lihat di lampiran pertama Pak, masih ada anggarannya, ada Satker-nya Pak, ini mungkin mohon klarifikasi dari Pak Menteri apakah sisa dari kerja komisi yang kemarin atau bagaimana, karena ini masuk anggaran di 2015 Pak saya lihat kolom pertama di poin ke-2 Pak, ada Satker Komisi Hukum Nasional. Kalau memang dibubarkan, saya kira nanti pertanggungjawabannya bagaimana Pak sudah dibubarkan masih dapat anggaran? ini menurut saya perlu pencermatan yang lebih mendalam Pak.

Kemudian yang terakhir Pak, saya lihat luar biasa pemerintahan sekarang sangat cepat, responsif, tetapi terkadang kita juga agak bingung Pak Menteri, misalkan di awal-awal pemerintahan Pak Menteri sampaikan bahwa kartu sehat, kartu pintar itu, berasal dari CSR misalkan Pak, tapi di hari yang sama besoknya para Menteri yang lain mengatakan tidak, itu adalah dari APBN misalkan. Nah ini mungkin Pak saya mungkin mohon konfirmasi sebenarnya bagaimana koordinasi ataupun dalam melakukan pernyataan-pernyataan pemerintah itu bagaimana Pak? Protap-nya kira-kira begitu Pak. Biasanya memang Setneg-lah yang paling berhak ataupun yang menjadi corong Presiden dan Menteri lain menurut saya tidak perlu membantah terbuka walaupun itu tidak sama Pak, karena akan membingungkan masyarakat.

Nah oleh karena itu menurut saya, saya setuju menguatkan fungsi Setneg ini menjadi apa namanya kebutuhan kita semua, sehingga kebijakan-kebijakan Presiden itu sebenarnya kalau bisa cuma keluar dari juru bicaranya itu Sekneg atau Sekretaris Kabinet Pak? Nah kalau itu dilakukan saya kira masyarakat akan tidak bingung dan para Menteri yang lain saya kira tidak perlu juga terbuka, kalau itu memang tidak sependapat ataupun tidak, belum pada koordinasi yang mantap Pak.

Saya kira itu Pak Pimpinan dan Pak Menteri, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan dari PKB. Ada?

F-PKB (Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Saya Zainul Arifin Noor, A-80, ya mungkin di sini saya ingin memberikan satu solusi atau masukan, yang mana kalau kita melihat realisasi anggaran pendapatan dan belanja ya mungkin kalau yang lain tadi lebih banyak berbicara ini, saya lebih fokus ke anggaran yang disampaikan ke kita.

sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang perlu kita
da poin 8 dan 9. Poin 8 dan 9 ini realisasinya itu lebih besar
ni perlu diberikan masukan tentang hal ini, kenapa sampai jadi

demikian?

Nah karena dalam hal ini kalau saya melihat di realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, ini Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden ini rencananya nanti di tidak ada ya Pak ya? yang Sekretariat Presiden ini? masih ada Pak ya?

Nah jadi hal-hal yang demikian yang ini nanti Pak yang perlu dievaluasi kembali, yang poin 8 dan 9 ini Pak, karena Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, karena kalau kita melihat persentasinya sangat tinggi sekali, kira-kira begitu Pak ya. Silakan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Lanjut, PKS oh ini langsung Pimpinan sama Kyai ini.

F-PKS (DR. H SA'DUDDIN, MM):

Baik Pak.

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pertama, saya minta maaf datangnya agak lambat, karena jalannya macet, kebetulan pas jalan pinggir dijaga polisi lagi, karena supirnya lagi sakit kebetulan, saya bilang mau cepat ada rapat, tapi polisi ngertilah selesai masalahnya.

Selanjutnya saya kenalkan tadi saya juga lambat, saya Sa'duddin Nomor Anggota 104 dari PKS Pak, Pak Menteri mohon maaf lambat, pertanyaan atau apakah sebuah ulasan yang sama-sama kita pahami bahwa yang pertama tadi juga sudah disampaikan apa yang saya rencanakan, cuma ingin mempertegas bahwa dulu kalau tidak salah ketika Dewan sebelum kami, Dewan apa inilah sebelumnya ini Pak Budiman, pernah membicarakan masalah Gedung Gelora Bung Karno dengan Kemayoran yang tadi disampaikan yaitu membentuk Panja. Panja tidak selesai dan tidak tuntas karena memang berkaitan dengan waktu pada saat itu dan pada saat itu konon katanya saya dengar bahwa Panja meminta kepada BPK untuk mengauditnya tapi sampai saat ini audit dari BPK belum kami dapatkan. Tolong mungkin Pak Menteri bisa menggambarkan tentang hal ini hasil audit dari BPK itu, itu yang pertama.

Yang kedua tentang penghapusan atau pembubaran Komisi Hukum Nasional yang dituangkan oleh Presiden Nomor 176 Tahun 2014 bahwa nampaknya Komisi Hukum ini tidak terlalu berperan, oleh sebab itu dibubarkanlah berdasarkan peraturan itu. Sekedar minta evaluasi sejauhmana anggaran yang telah disampaikan yang sebelumnya dianggarkan, ya walaupun di sini dijelaskan dialihkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Oleh sebab itu dari kami minta gambaran dengan rinci dan jelas agar kita bisa melanjutkan persoalan-persoalan tentang komisi-komisi yang terjadi pada saat ini, dan selanjutnya mungkin Pak Menteri nanti dekat dengan Presiden kesehariannya, kondisi hukum hari ini nampaknya kita bisa lihat bahwa antara satu sisi dengan sisi lain yang hari ini yang kita menjadi tontonan, sesama penegak hukum yang kita lihat saling memberikan ya kekuatan hukumnya masing-masing, saling merasa punya kekuatan hukum, oleh sebab itu bagaimana menyelesaikan tentang penyelesaian yang terjadi pada saat ini, sehingga kekuasaan yang dipegang oleh Presiden itu harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

F-PPP (KH. ASEP AHMAD MAOSUL AFFANDY):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Sebetulnya intisarinya sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, tapi saya pikir semua itu bermuara kepada personalnya. Artinya tentang rencana Pak Menteri mengenai penataan organisasi kementerian ini, itu tidak bisa dianggap sepele, artinya ini perlu penanganan yang secara serius berdasarkan kebutuhan, dan juga tentunya juga merupakan hasil dari pada evaluasi dan analisa. Apabila memang perlu dibentuk yang baru, ya bentuk yang baru. Atau bila yang ada, bila perlu dihapus ya hapuskan saja kalau memang itu tidak manfaat. Nah dengan demikian apabila penataan organisasinya ini sangat tepat, tentu saja itu juga akan berakibat kepada penganggarannya. Sehingga anggarannya juga bisa efisien dan efektif.

Itu saja Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Lanjut, Partai Nasdem. Agak lama disebut Nasdem-nya.

F-NASDEM (Drs. TAMANURI, MM):

Terima kasih Pimpinan.

Kami ini tiga orang, tapi yang dua dipanggil semua. Pak Menteri yang kami akan tanyakan masalah aset di Senayan ini. Apakah hanya yang ada itu sekitar GOR, sekitar apa lagi, Stadion dan lain sebagainya, karena semuanya saya lihat sudah jadi mall, sudah jadi hotel segala macam. Jadi apakah itu termasuk aset-aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara? kalau melihat dari segi pendapatan tadi, bahwa target 282 juta, masuk 32 juta ya ini sudah lumayan, tapi kalau kita lihat dari segi asetnya sebenarnya masih jauh yang kita harapkan bisa tercapai.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Hanura.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

Terima kasih Pimpinan.

**Teman-teman Anggota DPR Komisi II,
Bapak Menteri dan seluruh jajarannya.**

wabarakatuh.

mana structure yang dibangun di dalam kementerian ini, ada yang menarik struktur yang diemban oleh satu yang berkaitan dengan masalah urusan kelembagaan lainnya. Pak Giri kalau saya tidak salah tadi. Nah, kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi ini selalu blusukan ke hampir semua persoalan baik itu yang belum ada masalah, baik itu yang sedang bermasalah, baik itu menyangkut masalah apa pun beliau itu turun. Nah tentu Komisi II membatasi diri untuk tidak masuk di dalam persoalan, tetapi dengan adanya struktur hubungan kelembagaan dengan yang lain ini, pertanyaannya apakah hanya sifatnya administratif atau seperti apa ini?

Di meja saya sudah satu lemari laporan Pak, yang berkaitan dengan masalah pertanian, masalah dengan polisi, jadi mungkin nanti Pak Giri kalau bisa dapat nomor handphone kita diskusi. Nah jadi yang menarik lagi bagaimana kalau tadi bicara masalah aset, kenapa kita Pak Menteri tidak membuat suatu pandangan supaya kita atur ini aset negara ini apa. Kita tidak tahu bagaimana aset kita yang di luar negeri kedutaan-kedutaan, bahkan mungkin yang di perbatasan, tidak ada yang menyentuh selama ini. Tadi Komnas, Komisi Hukum Nasional sudah dibubarkan, bagaimana aset ini? itu mengenai aset.

Kemudian masalah penerimaan negara yang bukan Pajak. Apakah hanya lintas administrasi, contohnya begini saya dulu mantan lawyer Pak, jadi saya tau persis bagaimana proses mekanisme simulator bagaimana BPKB, bagaimana nomor polisi, itu diterima dalam bentuk penerimaan negara yang bukan Pajak, tetapi langsung dioperasikan oleh polisi. Nah saya tidak tahu nanti hubungan antar lembaga ini bagaimana ini. Bagaimana kita men-judge yang seperti ini? Jadi sangat banyak Pak Menteri, kalau mungkin nanti saya panjang lebar, lebih bagus barangkali kita nanti tukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sangat banyak ini.

Kalau usul saya Pak Menteri kalau boleh dilakukan audit forensik terhadap seluruh aset, terhadap seluruh masalah, baik itu yang bersifat hubungan kelembagaan, karena contoh begini, ada di meja saya sekarang ada kasus, tiba-tiba ini ada di intervensi disuruh oleh lembaga oknum lah saya katakan, ini menyangkut tanah BUMN, dirampas oleh oknum tertentu yang menyatakan bahwa itu sudah milik dia. Kemudian begini, maaf ini Pak dari Setwapres ini, ini banyak yang direbut oleh tentara-tentara Pak, ya oknum tentara. Jadi makanya saya bilang struktur ini memang menjadi menarik, yang berkaitan masalah penerimaan negara, kemudian aset negara, hubungannya tidak bisa kita hindari Pak. Pak Jokowi ngurusin KPK dengan Polri sekarang, itu bentuk sebuah satu contoh bahwa memang kita tidak bisa lepas dari permasalahan kasus.

Jadi pertanyaannya sampai sejauhmana kita bisa mengintervensi masalah ini sehingga tidak timbul kasus-kasus yang sangat serius. Itu barangkali Pimpinan, kurang lebih saya mohon maaf.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya kira kita cukupkan dulu, karena ini baru tahapan awal begitu, tapi setidaknya-tidaknya hal-hal yang disampaikan adalah merupakan hal yang penting, kita meminta konfirmasi dan penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara. Kami persilakan Saudara Menteri.

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA RI:

Ya, terima kasih Bapak Pimpinan,

Bapak-bapak dan Ibu Anggota Komisi II yang saya hormati.

ahan dan juga beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan
terangan singkat yang nanti akan dibantu oleh teman-teman

Yang pertama, kepedulian Bapak Ibu untuk meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal itu benar-benar menjadi konsen kami, nah karena fungsi Setneg sebetulnya bukan hanya Setneg tetapi juga Seskab, jadi sekarang ini yang berlaku ada sebagian misalnya Keppres itu Perpres itu menjadi urusannya Setkab, ada yang menjadi urusannya Setneg. Jadi kalau Perpres dan Keppres itu terkait dengan lembaga-lembaga negara itu Setneg, tetapi kalau terkait dengan kabinet itu Setkab. Nah ini juga menjadi salah satu kesulitan kita atau bukan kesulitan ya, tantangan baru di dalam kita melakukan sinkronisasi bahkan di antara Setneg dan Setkab ini yang kita sekarang mulai tata mengenai alur kerja di Setneg dan Setkab.

Nah sinkronisasi tersebut ada hal-hal yang sifatnya mekanisme kerja, tetapi juga hal-hal yang sifatnya sangat teknis. Misalnya yang kami sekarang sedang koordinasikan dengan seluruh kementerian adalah bagaimana kita melakukan sinkronisasi perumusan atau drafting terhadap kebijakan atau regulasi itu dibantu oleh teknologi informasi, sehingga kita bisa share editing. Jadi sekali buka, satu file itu bisa dibuka bersama-sama oleh seluruh kementerian dan diedit bersama. Tidak menunggu satu kementerian jadi, kemudian pindah ke kementerian yang lainnya dan seterusnya yang itu justru mengakibatkan nanti diubah di satu tempat, kemudian diubah lagi di tempat yang lainnya, dan itu tidak akan pernah rampung. Jadi ada inovasi teknis yang coba kami kembangkan agar pada level preventif ini sinkronisasi bisa ditingkatkan, ini yang sekarang kita lakukan, juga intensitas koordinasi diantara Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, kemudian Kumham dan kementerian terkait, kementerian teknis terkait sesuai dengan substansinya itu juga kita teruskan. Atas bantuan teknologi informasi ini kita harapkan bisa lebih cepat dan lebih efektif.

Nah yang memang pada akhirnya nanti kita harus kalau itu undang-undang tentu saja harus melibatkan DPR adalah level kuratifnya yaitu peraturan perundangan yang sudah ada, seperti tadi Pak Budiman sampaikan misalnya antara Undang-Undang Desa, Undang-Undang Agraria, kemudian Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, undang-undang itu sudah apa namanya ditetapkan, nah tentu saja ini mekanisme tahapnya sudah tahap kuratif bagaimana kita merevisi untuk meningkatkan apa sinergi dan atukah itu bisa dilakukan pada level di bawahnya *gitu*. Nah ini yang level kuratif ini yang memang membutuhkan kerja lebih ekstra.

Nah hal yang serupa, yang tadi Bapak-bapak konsen peduli mengenai komisi atau lembaga-lembaga, jadi yang kami evaluasi antara Setneg dan Setkab itu adalah keberadaan lembaga nonstruktural. LNS itu yang jumlahnya berapa Pak? hampir 90-an seingat saya, jadi itu cukup banyak, tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, tentu saja yang itu tidak diamanatkan oleh undang-undang, kalau itu diamanatkan oleh undang-undang ya kita tidak akan melakukannya dan nanti Pak Sapta dari Perundang-undangan dan juga Pak Cecep dari SDM dan organisasi bisa menjelaskan.

Nah saat ini kita sedang mengkaji LNS-LNS tersebut, sebetulnya kajian sebelumnya juga sudah ada, tentu saja merujuk pada dasar pembentukannya seperti apa, apakah itu pembentukannya atas dasar undang-undang atau tidak, kalau tidak dan sejauhmana itu tumpang tindih antara yang sudah ada fungsinya sudah dilakukan oleh lembaga lain atau tidak itu kalau memang tidak menimbulkan masalah dan justru meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Presiden sudah mengarahkan agar lembaga-lembaga tersebut kalau perlu dibubarkan, tapi kalau memang diperlukan ya ditata agar bekerja lebih efektif dan efisien.

Nah masih terkait dengan kelembagaan tentang UKP4. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya arahan Presiden adalah bahwa sinkronisasi kebijakan itu kalau lintas kementerian lebih efektif dilakukan sendiri oleh Presiden. Nah oleh karena itu lembaga-lembaga seperti UKP4 pada periode yang lalu, adalah mendukung kerja Presiden untuk rekomendasi drafting beberapa kebijakan dan melakukan monitoring. Nah kami perlu sampaikan bahwa tugas dan fungsi eks UKP4 itu sebagian dikelola ditangani oleh Sekretariat Kabinet yang berkaitan dengan sinkronisasi kerja-kerja lintas kementerian membantu Presiden, sementara itu untuk hal-hal terkait dengan komunikasi politik, dan

ini oleh Presiden itu dibantu oleh Unit Staf Kepresidenan. Itu
a kurang lebih akan semacam itu.

inta juga teman-teman menambahkan ini yang terkait mohon
maaf sebelum itu saya lanjutkan bahwa anggaran dari eks Komisi Hukum yang telah dibubarkan, itu
sudah diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk dialihkan menjadi anggarannya Kementrian
Hukum dan HAM, tetapi sampai sekarang masih belum tuntas begitu Pak Sesmen ya? Ya nanti Pak
Sesmen silakan untuk menjelaskan lebih lanjut.

Yang paling rumit kami sadari adalah terkait dengan pengelolaan aset. Jadi perlu kami
sampaikan secara singkat bahwa Kementerian Sekretariat Negara membentuk Badan Layanan Umum
untuk mengelola aset-aset tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Badan Layanan Umum,
undang-undang yang di situ disebutkan bahwa unit di instansi di lingkungan pemerintahan ini bisa
membentuk BLU, memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang
maupun jasa yang dijual ya, tapi tanpa mengutamakan keuntungan tetapi lebih menekankan pada
efisiensi dan produktivitas. Nah nanti saya persilakan nanti Pak Sesmen untuk bisa menjelaskan lebih
detil tentang ini, yang jelas Bapak Ibu sekalian, ketika saya Minggu-minggu pertama menjadi Menteri,
saya meminta tolong kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap Kementerian Sekretariat Negara
secara keseluruhan dengan mengkhususkan kepada pengelolaan GBK dan Kemayoran. Nah ini
Minggu ini BPKP sudah berjanji untuk akan apa menyerahkan hasilnya dan itu akan kami jadikan
sebagai rujukan awal untuk menelisik lebih dalam bagaimana kita mengelola aset ini dan ini seperti
Bapak-bapak dan Ibu ketahui bahwa ini memang permasalahan lama, yang apa perlu untuk kita
tuntaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, agar tidak terjadi kerugian negara dan agar kita
bisa melindungi kita semua dari resiko-resiko hukum yang bisa muncul di kemudian hari.

Ini yang saya sering mengatakan ke teman-teman di Setneg bahwa salah satu tugas Menteri
itu adalah melindungi segenap bangsa Setneg dan seluruh tumpah darah Setneg begitu, termasuk
melindungi orang-orangnya agar tidak menghadap permasalahan hukum ke depan. Ini saya setuju atas
dorongan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ini momentum yang akan kita gunakan dan kami akan
segera mempelajari apa hasil temuan dari BPKP yang akan kemarin sudah dilakukan 2 Minggu terakhir
sudah dilakukan koordinasi hasil akhir bersama-sama dengan staf Setneg dan Minggu depan akan
diserahkan kepada kami. Mungkin secara umum karena banyak konsen yang sama di antara Bapak
Ibu sekalian, tetapi nanti jika ada hal yang akan ditambahkan oleh Pak Sesmen atau Bapak-bapak
Deputi yang lain, termasuk dari teman-teman Direksi GBK Gelora Bung Karno dan Kemayoran saya
persilakan.

F-PKS (Dr. H. SA'ADUDDIN, MM):

Pimpinan sebagai tambahan, sebelum ditambahkan dengan Pak Menteri tadi, tambahan satu
yang tadi tertinggal. Saya mungkin menambahkan pertanyaan Pak yang belum saya dapat jawaban
dengan saya, bahwa kedudukan yang terjadi hari ini antara Mensetneg, dengan Setkab, dengan apa
lagi ya dengan Kepala Staf Kepresidenan dan staf khusus dan sebagainya, tolong diberikan gambaran
Pak sepiantas saja batasan-batasan dan tugas dan fungsi mereka, sehingga semuanya itu masing-
masing tugasnya ada. Jangan sampai nanti tugas ini dipegang oleh ini tidak jelas *gitu*. Kan semestinya
Setkab mengelola tadi digambarkan adalah kementerian dikelola oleh Setkab, Setneg yang sifatnya
umum, bagaimana yang sifatnya khusus dan lain sebagainya.

Terima kasih Pak tambahan.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Interupsi Pimpinan, Pimpinan, Mengingatkan saja, jam 12.00 tadi Pimpinan.

belum Dzuhur, ini belum Dzuhur. Lanjut Pak Menteri.

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA RI:

Terima kasih Pimpinan. Saya sampaikan secara cepat sehingga selesai sebelum jam 12.00 walaupun sekarang sudah lewat. Jadi satu sebetulnya organisasi yang ada sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati.

Kementerian Sekretariat Negara itu adalah urusan kesekretariatan negara, yaitu mengelola hubungan antara Presiden dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam konteks Presiden sebagai kepala negara. Itu definisi yang digunakan sebagai rujukan.

Yang kedua, Sekretariat Kabinet adalah mengelola, mendukung Presiden untuk menjalankan kerja kabinet dalam hal ini misalnya mengelola sidang kabinet, tindak lanjutnya dan kemudian mengawal kerja kabinet agar sesuai dengan arahan Presiden, sesuai dengan yang telah diputuskan dalam sidang kabinet dan lain-lain. Ini pembagiannya. Walaupun dalam prakteknya itu tidak mudah ini dilakukan secara tegas. Sebagai satu contoh, begitu Keppres SDM sebagai satu contoh, Keppres tentang pengangkatan pejabat, kalau jabatannya itu misalnya terkait dengan lembaga-lembaga yang misalnya Perpres tentang lembaga-lembaga di luar kementerian itu menjadi urusannya Sekretaris Kabinet, tetapi yang di internal kementerian menjadi urusannya Setkab. Nah sering kali ini tidak begitu clear cut begitu, yang kami lakukan sekarang adalah meningkatkan koordinasi, kemudian rapat eselon I, eselon II, sampai eselon III antara Setneg dan Setkab itu kita bersamakan untuk juga komunikasi kita punya forum yang sama diantara dua unit ini sehingga ini bisa kita minimalisir, tapi kami sedang mempersiapkan untuk menggeser-geser fungsi-fungsi yang sekiranya menimbulkan tumpang tindih, potensi tumpang tindih antara Setkab.

Sementara itu Unit Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan itu lebih menekankan kepada pertama adalah menjalankan penugasan Presiden untuk menganalisis merespons isu-isu strategis yang muncul secara mendadak dan melakukan komunikasi politik. Jadi yang sifatnya lebih apa namanya isu-isu krusial mendadak yang khawatir kalau tidak ditangani secara spesifik kemudian terbengkalai karena Setneg dan Setkab sudah terlalu banyak meng-handle urusan-urusan sehari-hari itu ditangani oleh Kepala Staf Kepresidenan. Jadi kira-kira pembagiannya seperti itu Bapak dan Ibu mungkin itu saja ya, nanti ada hal yang lain akan ditambahkan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Pimpinan, Pimpinan saya minta waktu. Henry Yosodiningrat, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Lampung II, No Anggota A-140. Saya tadi datang terlambat, mudah-mudahan itu sudah ditanyakan oleh rekan saya dari Fraksi PDI Perjuangan. Kalau sudah saya mohon maaf karena terlambat, tapi kalau belum ada hal yang ingin saya mintakan perhatian secara khusus.

Pertama, dalam kaitannya dengan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pengelolaan atas asset-asset yang berada di sekitar Gelora Bung Karno yang disewa untuk hotel, bangunan hotel, yang disewa untuk bangunan mall, termasuk yang di Kemayoran. Mengenai hal ini kami minta supaya dibuat suatu laporan secara transparan, karena kalau ini sudah berpuluh tahun menimbulkan atau menyisakan pernyataan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, kiranya untuk pemerintahan sekarang, pemerintahan yang bersih kami minta supaya kamipun bisa mengetahuinya secara gamblang dan bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan terang.

Terima kasih Pimpinan.

in penjelasan yang tadi.

SERETARIS MENSESNEG:

Terima kasih Pak. Seizin Pak Mensesneg, mungkin tambahannya ini Pak, kalau memang karena ini sudah waktu Pak, nanti kita sampaikan secara tertulis Pak karena waktu, juga mengenai aset ini Pak sedikit saja kami sampaikan mengenai di Gelora nanti kita siapkan Pak jawaban-jawaban begitu khususnya GBK dan juga Kemayoran mengenai apa yang disampaikan Pak Henry Yosodiningrat nanti kita akan paparkan Pak semuanya di dalam laporan. Memang kita Gelora dan Kemayoran juga diaudit Pak, jadi kita dengan diaudit BPK dan nanti kita akan sampaikan Pak laporan-laporannya mengenai memasukkannya apa-apa yang selama ini, dan harap diketahui bahwa Gelora dan Kemayoran tidak menggunakan APBN Pak. Jadi pemasukan yang dikelola oleh Gelora dan Kemayoran yang dibelanjakan itu. Jadi mungkin nanti kita akan jawab Pak, karena waktu juga.

Satu lagi Pak yang mengenai KHN tadi apa yang disampaikan Pak Menteri, mohon izin Pak Menteri Anggaran KHN memang dibekukan Pak, dan akan dialihkan kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait fungsinya Pak dan sekarang Kemensesneg sedang menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan untuk khususnya dalam pelaksanaan dari anggaran ini Pak. Saya rasa itu saja Pak.

Kalau tapi soal karena waktu Pak mungkin saya, tadinya mau tambahan dari Gelora.

KETUA RAPAT:

Kalau yang penting, terus saja Pak terus.

SESRETARIS MENSESNEG:

Mungkin ada tambahan dari.

F-PG (DRS. H. DADANG S. MUCHTAR):

Pak Pimpinan, Bu Diah mohon izin. Boleh tidak satu lagi katanya bertanya?

KETUA RAPAT:

Bu Diah tapi yang cepat saja begitu untuk konfirmasi.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.sos):

Saya akan coba singkat. Jadi Setneg ini kan punya, punya satu dimensi strategis dan taktis ya untuk menjalankan tugas kepresidenan. Pertanyaan saya itu apakah ada terobosan-terobosan kalau tadi dikatakan berfikir out of the box dalam menjalankan visi misi politik Pak Jokowi yang tentu karakternya berbeda dengan pemerintahan zaman Pak SBY, atau hanya merespons kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya normatif saja dari Kantor Kepresidenan, maksud saya di sini apakah Setneg mengembangkan satu strategi baru dalam mengimplementasikan visi misi politik kepresidenan atau cuma merespons seperti halnya birokrasi saja day to day gitu Pak.

Terima kasih.

Jara Menteri yang memberikan konfirmasi penjelasan.

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA RI:

Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Setneg memang bukan kementerian teknis, bukan mengawal policy dalam konteks satu misalnya dalam konteks kebijakan misalnya mengembangkan menjabarkan Nawa Cita dan seterusnya itu dikawal oleh apa namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kemudian turunannya adalah di Kementerian Keuangan. Kemudian ada kementerian-kementerian sektoral dan lain-lain, termasuk kemudian koordinasi yang dilakukan dalam konteks ini oleh Setneg adalah bagaimana agar Presiden punya informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan.

Jadi tugas kami adalah meminta kepada unit-unit terkait menjabarkan opsi kepada Presiden dan kita jangan sampai Sekretaris Negara juga mengambil alih dalam tanda petik otoritas substantif Presiden, jadi kita memberikan informasi yang memadai dan pada akhirnya keputusan itu adalah di tangan Presiden. Nah kita mengkoordinasikan misalnya ketika Bappenas itu membuat perencanaan dan itu dikawal betul oleh Presiden, kemudian Menteri Keuangan menjabarkannya ke dalam butir-butir anggaran, kemudian Menko-Menko terkait menjabarkannya kepada policy implementasinya dan tugas dari Kementerian Setneg dan Setkab adalah menjamin bahwa Presiden memperoleh informasi yang memadai, memperoleh alternatif kebijakan yang memadai dan kemudian memberikan apa melindungi Presiden agar punya waktu untuk membuat keputusan, ini juga sebuah pekerjaan yang sangat berat karena seringkali Presiden apa namanya terserap dengan berbagai macam kegiatan yang banyak sekali.

Kami berusaha untuk Presiden punya informasi, punya pengetahuan, punya waktu yang memadai untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Nah ini kita topang dengan berbagai macam teknis ya agar fungsi ini bisa tercapai, termasuk misalnya apakah Nawa Cita sudah muncul di dalam RPJMN kita dan seterusnya, RPP kita dan lain-lain, nah itu tugasnya Bappenas, tetapi kita memberikan informasi kepada Presiden hal-hal yang terkait dengan tersebut. Itulah mengapa kemudian di Setneg juga ada dujak, tetapi sekali lagi kita jangan sampai mengambil alih hal-hal strategis yang ditangani sendiri oleh Presiden. Jadi saya persilakan kalau terkait dengan Gelora Bung Karno dan Kemayoran barangkali ada tambahan lagi Pak Henry tadi sudah kita bahas, tapi kalau ada dari, saya persilakan Pak.

DIRUT. GELORA BUNG KARNO (NOVAL HASAN):

Terima kasih. Yang saya hormati Pimpinan Komisi II dan para Anggota Komisi II, Bapak Menteri Sekretaris Negara dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Negara. Selamat siang.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak-bapak dari fraksi PAN, tadi ada dari PKB, PKS, PDIP dan Nasdem, kami sangat setuju bahwa PNBK di Gelora Bung Karno memang belum optimal Pak, dibandingkan dengan

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Sebentar, yang memberikan penjelasan supaya siapa jabatannya apa, supaya kami catat di sini siapa yang memberikan penjelasan.

Terima kasih.

saya Noval Hasan, saya Direktur Utama Gelora Bung Karno.

Kami berpendapat bahwa PNBPN dikaitkan dengan asetnya memang belum optimal, ini terbukti bahwa telah dibentuk beberapa kali Panja Aset Negara di Komisi II ini. Nah, untuk itu Pak, saya akan menjelaskan sedikit bahwa aset di Gelora Bung Karno secara keseluruhan seluas 279,1 hektar, yang dibagi menjadi beberapa penggunaan.

Yang pertama digunakan oleh kementerian dan lembaga itu sebanyak seluas 21,65%, digunakan oleh Mendikbud, DPR, Kehutanan, Menpora dan seterusnya. Jadi sudah jelas bahwa dari 21,65% ini tidak berkontribusi sama sekali.

Yang kedua, dikelola oleh PB Pak, PB-PB olahraga seperti contohnya Stadion Madya, Perbakin, Stadion Madya cukup luas Pak, Perbakin, itu juga tidak berkontribusi, karena ini adalah area olahraga.

Lalu yang ketiga dikelola oleh PPK GBK oleh PB 13,4% Pak. 13,4%. Kemudian dikelola oleh PPK GBK di atas lahan itu ada stadion serta fasilitas olahraga lainnya itu seluas 19,75%.

Nah yang keempat, dikerjasamakan dengan para mitra DOT dan KSO 35,1%. Lalu yang 10,2% lain-lain yaitu HGB yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi pada saat HPL ini diterbitkan, di lahan situ sudah ada HGB. Contohnya seperti Toko Ban, Panin, Ratu Plaza. Itu jadi pada saat HPL itu terbit sudah ada HGB. Jadi itu dikatakan HGB di atas HPL Pak.

Nah kemudian dari saya akan melanjutkan sedikit dari aset yang dikerjasamakan yang tadi harusnya dikaitkan dengan PNBPN 35% itu memang kondisinya perjanjian itu sudah ditandatangani sejak lama Pak, sejak Tahun 1989 dan seterusnya. Jadi era sekarang sebetulnya sudah tidak ada perjanjian baru. Nah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan tersebut, kami berupaya melakukan renegotiasi itu juga atas rekomendasi dari Panja Aset Negara.

Hasilnya ada yang mau ada yang tidak Pak, karena perjanjian itu sudah ditandatangani, mereka masih beranggapan bahwa perjanjian yang sah itu merupakan undang-undang bagi dua pihak. Namun demikian ada juga sebagian yang mau. Nah dari yang mau itu terbukti Pak bahwa pendapatan 2014 ini sudah terlihat ada peningkatan. Sampai dengan detik ini masih ada beberapa mitra yang sedang dilakukan proses penilaian bisnis oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi kami di sini tidak berhenti terus melakukan upaya tersebut. Jadi kalau memang akan ada penguatan atau dorongan dari Komisi II lagi kami sangat setuju Pak. Jadi ini kan sama-sama, kalau dibilang ini permasalahan kami memang, tapi permasalahan yang sudah lama terjadi. Siapapun yang duduk di situ tentunya tidak akan mudah melakukan itu sendirian.

Demikian tambahan dari saya. Terima kasih Pak Menteri.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Pimpinan, begini, saya tertarik bahwa ada beberapa areal yang dengan sistem BOT dan KSO dengan mitra istilahnya, inilah yang sebetulnya saya ingin pertanyakan. Kalau seperti Kantor DPR, yang lain-lain itu tidak saya pertanyakan itu. Justru barusan seakan curhat bahwa ini sudah terikat dengan perjanjian sejak Tahun 1981 dan sebagainya, ada yang mau dan ada yang tidak, ini negara hukum, coba kepada Komisi II pun diinformasikan itu kami perlu tahu kontraknya itu seperti apa? Kami pun berhak untuk menilai apa yang harus kita lakukan, bila perlu gugat pembatalan. Jadi jangan karena oh yang ini tidak mau, kita sedang approach kami tahu nilainya itu ratusan milyar.

Nah ini yang supaya transparan mungkin pada kesempatan berikutnya bisa kita bicarakan secara khusus terkait dengan hal itu dan nanti akan terbuka apa sih yang sedang terjadi, di mana sih letak kesulitannya, siapa sih yang turut bermain dalam hal ini.

Terima kasih.

. Ya, sedikit saja. Tadi kalau disampaikan tadi oleh Direktur Pengelolaan Gelora Bung Karno, kalau perjanjian itu dianggap bahwa itu ada menganggap bahwa itu adalah sebagai undang-undang, maka saya kira perlu kita pikirkan Pak Ketua di komisi ini itu bagaimana kita membuat sebuah Undang-Undang Pengelolaan Aset Negara, supaya menggugurkan apa yang disampaikan oleh Direktur tadi bahwa perjanjian itu dianggap sebagai undang-undang. Kita bikin sebagai Undang-Undang Pengelolaan Aset Negara, saya kira itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tadi kalau soal aset negara ini, kita harus pembicaraan secara khusus, kita cari waktu berikutnya dan masuk dalam kesimpulan. Jadi dari hasil pembicaraan tadi memang harus terbentuk sampai ya aset negara ini bukan hanya soal Gelora ini, Kemayoran, terus yang lain-lain, sampai aset-aset daerah, itu sebenarnya negara juga yang punya kalau ada aset daerah, di dalam dan di luar negeri. Oleh karenanya ada nanti pembicaraan khusus yang menyangkut itu. Saya kira Saudara-saudara, tiba kita pada kesimpulan. Ada lagi? Ini dari Aceh nanti kalau tidak diberikan.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Makanya dari Aceh ke pusat ini.

KETUA RAPAT:

Oh gitu.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Silakan Pak Tagore, terima kasih. Singkat saja lewat Pak Menteri ini.

Dari keterangan Direktur yang mengelola Gelora Bung Karno tadi ada beberapa keanehan Pak, sebelum ada HPL ada HGB, ini tidak terjadi ini, jarang terjadi, ini ada apa? yang pertama.

Yang kedua, ada MoU yang statis sifatnya, ini jarang. MoU itu biasanya dinamis dia, karena dia melewati masa itu pasti dinamis. Terbukti tadi ada yang dinamis ada yang tidak, yang statis ini mungkin punya orang kuat ini. Jadi sekuat-kuat orang di negeri kita lebih kuat hukum, jadi Ketua di kesimpulan dibuat saja Ketua ini perlu karena kami dari PDI juga ditugaskan khusus untuk kepentingan ini. Ini ada dari keterangan ini saja Pak Menteri, saya mencium sesuatu yang aneh. Ini sama-sama aset negara ini kita apakan kita kelola untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian saya lihat, saya khawatir ini ada yang masuk langsung digunakan, tidak disetorkan dulu ke negara langsung digunakan Pak. Ini ada kemungkinan, ini saya cium ini, mudah-mudahan ciuman saya ini tidak benar, tapi kalau sudah saya cium biasanya Pak ini betul nanti Pak Menteri, kalau ciuman dari Aceh ini kuat ini, karena biasa cium-cium GAM itu, cium-ciuman ini lebih gampang.

Terima kasih Ketua.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

Pimpinan, Pimpinan.

Sedikit Pimpinan sedikit, ini kebetulan saya mau tanya ini Pak Pimpinan, saya mau tanya ke Pak Menteri, untuk aset-aset yang eksisting sekarang di Aceh ini kan ada rencana penyerahan aset

ngroe Aceh Darussalam, bisa tidak itu dibuat dulu klarifikasi di kemudian struktur yang seperti apa, kemudian begitu juga aset-*gitu*, karena ada rencana mau membuat RPP itu.

Terima kasih Pimpinan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya usul tadi termasuk catatan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Pimpinan sebentar, ini ada pertanyaan saya yang belum dijawab Pak Menteri tadi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Tentang simpang siurnya Menteri ini ngomong A, yang lain ngomong B ya kan, masalah misalkan awal Pak Menteri ngomong CSR itu untuk kartu sehat, yang lain membantah *gitu*, ini penting loh Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jika ada mau ditambahkan Saudara Menteri bisa saya kira.

F-PG (Drs. H.A. MUJIB RAHMAT):

Sekalian Pak Ketua, sekalian Pak. Kenapa PNBP tadi itu 2015 malah turun targetnya itu tolong dijelaskan. Yang kedua adalah permohonan APBNP yang 209 ditolak yang ada hanya 29, lalu besok kita ini mau bicara tentang anggaran sekalian mohon dijelaskan Pak Menteri.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Pimpinan, Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apalagi yang sedikit?

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Masa Pak Zul tidak boleh lagi, Saya ini kalau dilarang Pimpinan ya itu, kali ini cuma mengingatkan Pimpinan saja. Ya justru karena itu sudah kepalang langgar. Pimpinan bilang kita yang ringan-ringan saja. Nah yang berat nanti, karena dia itu ada ringan berat itu saya tidak mau bicara

ik nanti buat RDP saja kita Pimpinan ini usul. Jadi kita yang
Pimpinan ringan-ringan. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan. Lanjut Pak Menteri jika ada penjelasan yang masih gantung tadi.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak. Seizin Pak Menteri. Mengenai PNB Pak, memang yang itu bukannya turun Pak, ya kita tergantung dari pada sewa itu pak, kan Pusdiklat itu disewakan *gitu* Pak, disewakan, nanti baru disetor ke kas negara dalam arti itu di situ dari departemen-departemen banyak menyewa di sana, jadi kalau kita kementerian-kementerian yang menyewa di tempat Pusdiklat di Kementerian Sekretariat Negara. Jadi bukan karena itu ada apa, tapi sesuai dengan perencanaan Pak kalau di kita tergantung dari orang yang menyewanya itu Pak. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih.

PEMERINTAH:

Saya tambahkan. Terima kasih Pak. Jadi itu saya kira sejalan dengan berjalannya waktu, dan kemudian sinergi Insya Allah perbedaan itu tidak terjadi lagi. Kemudian tentang aset itu Pak yang Aceh tadi, itu dikelola oleh Kementerian Keuangan Bapak, jadi oleh Dirjen Kekayaan Negara. Saya kira itu saja Pak Pimpinan tambahan saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan tentang GBK dan PPK Kemayoran, kami siap untuk nanti Pak Sesmen atau Direksi GBK dan PPK untuk memberikan penjelasan yang lebih detil kepada Bapak Ibu sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tiba kita pada kesimpulan.

Jadi Yang pertama, Komisi II DPR RI telah menerima dan memahami rencana strategis Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019 dan meminta ini yang semua tadi, dan meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya untuk melaksanakannya secara konsisten dengan mempertimbangkan pula catatan-catatan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Saya kira sudah dicatat tadi catatan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Konsisten dan optimal *gitu* Pak.

KETUA RAPAT:

Konsisten dan optimal, ini yang pertama. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Ya. Termasuk tadi catatan yang menyangkut bagaimana upaya yang dipertanyakan oleh Ibu Diah dan yang diusulkan oleh Pak Tagore itu. Ya untuk mengawal, jadi Pak Tagore ini ya yang kita hibahkan untuk mengawal ke sana.

II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan oleh Saudara Menteri merancang maksud kita sinkronisasi, merancang rumusan tentang administrasi tertib hukum, aturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi Perpres jangan bertentangan dengan aturan di atasnya.

Jadi Pak Menteri tadi sudah jawab, Mensesneg akan melakukan sinkronisasi regulasi administrasi hukum peraturan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan sistem yang dimaksudkan tadi ya memakai teknologi informasi. Ini yang dimaksudkan dari rumusan yang kedua ini.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Pimpinan. Pimpinan. Saya kira pada substansi saya setuju, tapi mungkin penggunaan kata ini penting Pak Ketua, karena sekarang kan sudah menjadi kebutuhan dan sepanjang yang kita tahu ini sudah sangat mendesak, saya kira bahasanya itu bukan meminta tapi mendesak.

KETUA RAPAT:

Mendesak ya?

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Sehingga ada keseriusan di situ dan kita kalimatnya adalah kalimat aktif. Kalau meminta itu pasif Ketua, kalau dikasih iya, kalau tidak ya tidak apa-apa, meminta kan. Coba kalau mendesak itu ada semacam, di situ ada fungsi pengawasan kita Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri kami persilakan.

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA RI:

Ya. Di sini sebetulnya banyak tugas dan fungsinya Menkumham juga Bapak. Jadi yang kita lakukan di sini adalah bersama-sama dengan Kemenhukham mendukung Menkumham untuk melakukan ...(suara tidak jelas) jadi itu. Sementara proses tata cara perumusan perundang-undangan itu sebenarnya juga sudah ada undang-undangnya, yang kita lakukan adalah proses itu kita lakukan secara cepat bersama-sama dengan Kumham. Jadi penting di sini untuk anukan Kumham, Menkumham.

KETUA RAPAT:

Ya jadi kata-kata meminta tadi mendesak Pak Menteri, jadi ya memang kita perlukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah administrasi tertib hukumnya sesuai dengan lingkup sebenarnya, sesuai

Sekretariat Negara ya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas sesuai dengan lingkup kewenangan tugas Kementerian Nomor 2 ya?

(RAPAT: SETUJU)

F-PG (Drs. H.A. MUJIB RAHMAT):

Ketua sebentar Ketua. Tadi yang rumusannya Pak Menteri itu bagus itu yang horizontal dan vertikalnya. Itu tadi yang mau disinkronisasi itu baik yang horizontal maupun yang vertikal itu apa namanya rumusan dari Pak Menteri saya kira bagus untuk dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Ya sudah termasuk semua, tapi kalau toh dimasukkan ya tumpang tindih peraturan perundang-undangan itu yang horizontal dan juga yang vertikal itu yang sudah dimasukkandi situ. Nomor 3, nah ini tadi, Komisi II DPR RI mendorong, nah ini tadi adalah meminta sudah mendesak ini mendorong, Kementerian Sekretariat Negara agar segera menyelesaikan permasalahan terkait aset negara di dalam maupun luar negeri sekaligus melakukan, jadi bukan hanya Kemayoran saja, mendesak ini, ah ini mendesak boleh. Sekaligus melakukan kordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pemanfaatan dan penerimaan negara dari aset-aset tersebut. Oleh karena itu kalau bisa ditambahkan, oleh karena itu diperlukan pembicaraan tersendiri dengan harapan sampai terbentuknya ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang aset negara ini.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Koreksi sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Coba kembali yang tadi itu menyelesaikan permasalahan terkait aset negara dalam di dalam maupun di luar, khususnya mengenai aset yang dikerjasamakan atau istilah apa itu tadi ada yang KSO, ada yang BOT, jadi yang dikerjasamakan dengan pihak luar yang dibisniskanlah begitu itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya.

PEMERINTAH:

Mohon maaf Bapak. Jadi aset yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara itu ya terbatas pada aset-aset yang hanya ada di Jakarta saja, Kemudian yang di luar negeri itu adalah di bawah Kementerian Luar Negeri, sementara yang bertanggungjawab penuh terhadap aset secara keseluruhan itu adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Dirjen Kekayaan Negara, jadi ini yang di bawah anu pengelolaan, ya di bawah,

Kementerian Sekretariat Negara *gitu* ya ditambahkan masuk

saja?

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Antara lain kan begitu disebutkan antara lain, yang dikerjasamakan dengan

KETUA RAPAT:

Tidak, yang dikelola itu sudah termasuk antara lain Pak.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Kenapa?

KETUA RAPAT:

Yang seluruhnya dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

F-PDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH.):

Oh tidak, kalau yang dikelola seperti misalnya ada tadi yang dibangun oleh TV RI dan sebagainya, itu kan masuk dalam wilayah yang aset negara yang berada di dalam pengawasan atau apa istilahnya oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang saya pertanyakan, yang saya persoalkan, saya tidak tahu dari fraksi yang lain, khusus dengan tanah-tanah yang dibangun mall, dibangun pertokoan, dibangun hotel, nah itu yang saya maksud yang lain saya tidak persoalkan itu.

KETUA RAPAT:

Atau di mana kita masukkan saudara Henry?

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang dikelola dan dikerjasamakan. Ya Pak Yandri silakan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Saya kira kesimpulan ini kan tidak terlalu detail, tapi substansinya yang penting bagi kita Pak. Jadi menurut saya ini sudah betul, tinggal disempurnakan saja itu yang mau kita itukan misalnya permasalahan di lingkungan yang dikelola oleh Sekretaris Negara. Itu termasuk semua, termasuk yang tidak dikerjasamakan juga penting Pak, siapa tahu ada penyimpangan juga di situ ya kan. Jadi kalau semuanya kita biar tahu tadi yang 90% bagaimana, yang 31% bagaimana *gitu* loh, Jadi menurut saya biar clear semua tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, menurut saya sudah pas itu yang dikelola oleh Sekretariat Negara, itu saja, nanti akan masuk semua itu Pak.

Dapat kita setuju ya Pak Menteri, setuju? ya.

(RAPAT: SETUJU)

Yang keempat, Komisi II DPR RI dapat menerima laporan realisasi belanja APBN Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2014 yang tingkat penyerapannya 85,23%. Serta mengapresiasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara terkait perolehan PNBPN Tahun 2014 yang mencapai 140,31% dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk lebih mengoptimalkan perolehan dari PNBPN pada Tahun 2015. Kira-kira cocok ini kesimpulannya?

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Ketua. Biasanya Ketua kalau perencanaan yang bagus, di penerimaan itu dia naik turunnya cuma 10%, kalau sudah 40% berarti perencanaan penerimaannya tidak bagus. Jadi kita tidak bisa apresiasi ini. Kenapa sampai meningkat sampai 30% itu ada apa? ini ada keanehan. Ya meningkat 40% berarti yang tidak bagus perencanaan penerimaan. Jadi jangan sembarangan apresiasi ini. Karena naik turunnya suatu penerimaan itu yang bagus di sekitar 10% Pak Menteri. Bukan 40% berarti ada yang mau disimpan tiba-tiba ketahuan disetor *gitu* loh, betul Pak Menteri kan? Jadi kita perbaiki ini. Jadi apresiasi di 140% itu Pak Ketua, itu tidak betul. Kalau di kampung saya betul Pak, tapi kalau di negara tidak. Berarti ada hal-hal yang tiba-tiba ada di luar perencanaan penerimaan, atau ada keterangan entah mungkin tiba-tiba ada naik ini dan lain-lain, karena di atas 10% harus ada keterangan. Jadi kita pahami lah, kalau di kampung saya betul Pak, penerimaan 200% jago kau, ini negara Pak beda.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ini Pak Tagore ini sekarang di PDIP ini mantan Bupati Pak, mantan Bupati, dulu di kandang saya. Sekarang mantan Bupati dan di PDIP. Oleh karenanya saya kira ya Pak Tagore ini lebih dari 100 penerimaan, kita apresiasilah.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Di sebuah perencanaan yang bagus itu kalau naik dia 10% itu bagus. Kalau sudah 140% kenapa ada 40% tiba-tiba naik? ini suatu keanehan. Mungkin ada yang mau disimpan, tiba-tiba ketahuan disetor, maka perencanaannya tidak bagus.

KETUA RAPAT:

Menghargailah.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Perencanaannya tidak bagus.

Terima kasih.

NA HUTAHURUK, SH., MM., MH):

apresiasi kinerja ini karena kalau tadi memang planing-nya memang tidak benar, boleh-boleh, tapi mungkin ini efisiensi barangkali, kita kan tidak tahu ini. Nah jadi saya pikir sudah sangat tepat.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya betul, Saya kira setuju ya? setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi tadi Pak Tagore bukan mewakili PDIP itu ya.

Berikutnya yang kelima, ini sudah kesimpulan ini yang terakhir, terhadap anggaran Kementerian Sekretariat Negara pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang akan datang. Jadi RDP yang akan datang itu tanggal 6-7, ini sudah dekat sekali. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oleh karenanya berakhirilah Rapat Dengar Pendapat kita pada siang hari ini, dengan keterlambatan ya sampai 15 menit tapi luar biasa kita putuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian apa Saudara Menteri menyampaikan kesan rapat pertama ini? kalau ada rasanya kesan silakan disampaikan Pak.

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA RI:

Terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Bapak Ibu sekalian.

Terima kasi.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat dengan ini kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Jakarta, 2 Februari 2015
Ketua Rapat

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236